

PENGARUH DANA PERIMBANGAN DAN INVESTASI SERTA TENAGA KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PADA ERA DESENTRALISASI FISKAL

Sunarto

Faculty of Economic

University 17 Agustus 1945 Samarinda

Jl. Ir. H. Juanda No. 80 PO BOX 1052 Indonesia Telp/Fax: 0541 743390

sunarto.mirmansuhud@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of balanced funds, investment, and labor force to economic growth in urban areas of East Kalimantan Province during the period 2004 to 2008 and to identify the variable fund balance, investments, and the labor force, which variables are the dominant influence on economic growth in urban areas of East Kalimantan Province during the period 2004 to 2008 on Fiscal Decentralization Era.

The results of data processing using SPSS for Windows find value of Coefficient of Determination (R Square) in the above calculation is for 0.654 or equal to 65.4%. While Adjusted R square (which is adjusted KD) of 0.589 means that 58.9 percent of the variance of economic growth in urban areas of East Kalimantan Province can be explained by the variance of the three independent variables in the model. Results of regression coefficients values for each independent variable on the entire observation area (urban area Samarinda, Balikpapan, Bontang and Tarakan) obtained is $Y = 0.072 - 0.022 X_1 + 0.002 X_2 + 0.055 X_3$. It is estimated that the economic growth of urban areas in the province of East Kalimantan will decreased by 0.022 percent, if the fund balance has increased one unit (in billions). Also estimated that economic growth in the urban area of East Kalimantan province will experience an increase of 0.002 percent, if investment increases one unit (in billions).

Keywords: *Balanced Funds, Investment, Economic Growth*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah umumnya merupakan refleksi dari dinamika perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Perkembangan pertumbuhan ekonomi memang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Jika diringkaskan, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor, yaitu faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Faktor ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara

tergantung pada sumber alamnya, sumber daya manusia, modal usaha, teknologi yang digunakan, dan sebagainya. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi juga ditunjang oleh faktor non-ekonomi, seperti lembaga sosial, sikap budaya, nilai moral, kondisi politik, dan kelembagaan dari negara tersebut.

Implementasi otonomi daerah atau desentralisasi yang luas sekarang ini memiliki tujuan untuk mengembangkan seluruh potensi ekonomi yang ada

sehingga dapat memacu peningkatan aktivitas perekonomian di daerah yang pada akhirnya meningkatkan perekonomian nasional. Penerapan otonomi daerah yang telah digariskan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 32 dan 33 Tahun 2004, mensyaratkan adanya suatu perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Desentralisasi fiskal tidak akan berguna jika tidak diikuti dengan kemampuan finansial yang cukup memadai oleh pemerintah daerah. Relevan dengan tujuan utama pemberian dana perimbangan dalam kerangka otonomi daerah adalah untuk pemerataan kemampuan fiskal pada tiap daerah (*equalizing transfer*) (Ehtisham, 2002:5).

Melalui UU Nomor 33 Tahun 2004, diharapkan nantinya akan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk pendanaan pemerintah daerah menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 dalam pelaksanaan desentralisasi meliputi: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah.

Provinsi Kalimantan Timur menjadi salah satu daerah otonomi semenjaknya diberlakukannya desentralisasi melalui

undang-undang tentang otonomi daerah. Pembangunan di Kalimantan Timur dari tahun ke tahun makin terus meningkat. Perkembangan tersebut tentunya tidak terlepas dari adanya potensi yang besar, yaitu potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya manusianya. Pembangunan juga tampak makin menggeliat.

Kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur cukup banyak mendapatkan dana perimbangan dari pusat. Dana perimbangan inilah yang dijadikan dasar pendapatan utama yang cukup dominan porsinya dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Sepanjang tahun 2004-2008, dana perimbangan di Provinsi Kalimantan Timur selalu mengalami peningkatan. Selain itu porsi dana perimbangan terhadap total dari APBD Provinsi Kaltim selalu dominan. Ini mengindikasikan besarnya ketergantungan APBD terhadap dana perimbangan dibandingkan penerimaan lain seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penerimaan lain yang sah.

Adapun besarnya dana perimbangan di wilayah kota di Provinsi Kalimantan Timur yaitu Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang, dan Kota Tarakan dapat disimak berikut ini.

Tabel 1. Jumlah Dana Perimbangan di Wilayah Kota Provinsi Kaltim Tahun 2002 – 2007 (dalam juta Rupiah)

Tahun	Samarinda	Balikpapan	Bontang	Tarakan
2004	550,373	766,421	408,643	427,600
2005	660,579	789,675	546,324	564,780
2006	862,488	804,024	802,535	636,890
2007	913,317	802,321	842,400	607,184
2008	908,652	824,766	864,300	596,114

Sumber: Nota Keuangan APBD Wilayah Kota Provinsi Kaltim, 2009

Selain faktor dana perimbangan, dinamika investasi swasta atau penanaman modal swasta juga turut mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi dari Harrod-Domar, menerangkan adanya korelasi positif antara tingkat investasi dan laju pertumbuhan ekonomi, dapat dikatakan kurangnya investasi di suatu wilayah membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat per kapita di wilayah tersebut rendah (Tambunan, 2003:78).

Setiap daerah senantiasa berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi. Sasaran yang dituju bukan hanya masyarakat atau kalangan swasta dalam negeri tetapi juga investor asing. Pada dasarnya Investasi merupakan pembentukan modal yang mendukung peran swasta dalam perekonomian. Menurut Harrod Domar,

dalam mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan investasi-investasi baru sebagai stok modal seperti penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing (Arsyad, 1999:112).

Investasi di Kalimantan Timur secara kumulatif sampai dengan tahun 2007 mengalami peningkatan 68 persen dari tahun sebelumnya sebesar 4,5 milyar dan untuk penanaman modal asing mengalami penurunan yaitu dari 958 juta US\$ pada tahun sebelumnya menjadi 101,8 juta US\$ pada tahun 2006. Pertumbuhan ini menunjukkan gambaran bahwa minat berinvestasi di Kalimantan Timur cukup tinggi, walaupun kondisi perekonomian masih kurang stabil (masa pemulihan) akibat krisis global yang terjadi sejak akhir tahun 2007 (RPJMD Provinsi Kaltim, 2009:35).

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh dana perimbangan, investasi, dan angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah kota Provinsi Kalimantan Timur selama periode 2004 – 2008.
2. Untuk mengetahui di antara variabel dana perimbangan, investasi, dan angkatan kerja tersebut, variabel mana yang berpengaruh dominan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah kota Provinsi Kalimantan Timur selama periode 2004 - 2008.

KERANGKA TEORITIS

Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan yang dikemukakan oleh Harrod-Domar merupakan perluasan dari analisa Keynes mengenai kegiatan ekonomi nasional dan masalah penggunaan tenaga kerja. Teori Harrod-Domar pada hakekatnya berusaha untuk menunjukkan syarat yang diperlukan agar pertumbuhan yang mantap atau *steady growth* yang dapat didefinisikan sebagai pertumbuhan yang akan selalu menciptakan penggunaan sepenuhnya alat-alat modal yang akan selalu berlaku dalam perekonomian.

Adapun Robert Solow dan Trevor Swan secara sendiri-sendiri mengembangkan model pertumbuhan ekonomi yang sekarang sering disebut dengan nama model pertumbuhan Neo Klasik. Model Solow dan Swan

memusatkan perhatiannya pada pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi dan output saling berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi (Boediono, 1985 : 81).

Dana Perimbangan Pusat dan Daerah (*Intergovernmental Transfer*)

Desentralisasi, perencanaan dan pengelolaan pembangunan perlu didukung oleh kebijaksanaan penyerahan sumber-sumber keuangan yang memadai. Kebijakan ini tidak hanya menyangkut besarnya dana yang dialokasikan kepada daerah, tetapi lebih lagi dibutuhkan pelimpahan kewenangan kepada daerah untuk menggunakan dana tersebut sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Pemberian sumber-sumber keuangan yang memadai tidak dapat sepenuhnya digantungkan pada PAD, namun juga perlu didukung oleh sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat. Peningkatan potensi penerimaan daerah hanya dapat dilaksanakan jika daerah mendapat sumber pendapatan yang potensial (Pangestu dalam Makmun, 2000:43).

Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 bahwa perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa kepada daerah diberikan kewenangan

untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah.

Teori Investasi

Berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi dari Harrod-Domar, menerangkan adanya korelasi positif antara tingkat investasi dan laju pertumbuhan ekonomi, dapat dikatakan kurangnya investasi di suatu wilayah membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat per kapita di wilayah tersebut rendah (Tambunan, 2003:41).

Investasi adalah bentuk penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang. Menurut Makmun (2000:11), Investasi adalah mobilisasi sumber daya untuk menciptakan atau menambah kapasitas produksi/pendapatan di masa yang akan datang. Dalam investasi ada 2 (dua) tujuan utama yaitu mengganti bagian dari penyediaan modal yang rusak dan tambahan penyediaan modal yang ada.

Domestic Investment dan Foreign Investment

Domestic artinya adalah dalam negeri, sedangkan *foreign* artinya luar negeri. Dengan itu maka jelaslah bahwa *domestic investment* adalah penanaman

modal dalam negeri, sementara *foreign investment* adalah penanaman modal asing. Sebuah negara yang memiliki banyak sekali faktor produksi alam dan/atau faktor produksi manusia, namun tidak memiliki faktor produksi modal yang cukup untuk mengolah faktor-faktor produksi yang dimilikinya tersebut, akan mengundang masuknya penanaman modal (investasi) swasta baik itu yang bersumber dari *domestic investment* dan *foreign investment* tersebut.

Untuk membangun suatu perekonomian harus memiliki *Social Overhead Capital* yaitu proyek-proyek raksasa yang diperlukan untuk memperlancar bisnis dan perdagangan seperti jalan raya, rel kereta api, proyek irigasi dan bendungan, serta sarana kesehatan umum. Semua ini memerlukan investasi yang sangat besar yang cenderung bersifat sekaligus. Tidak ada seorang pun atau perusahaan kecil yang mampu membangun suatu sistem jalan raya. Tidak ada perusahaan yang bisa berharap mendapatkan laba jika dana yang diperlukan tidak mampu disediakan oleh pemerintah. Di sinilah manfaat proyek investasi skala besar yang ke semuanya itu berasal dari luar negeri yang dapat menyebar ke seluruh perekonomian.

Dana Perimbangan dan Implikasinya

Investasi dari pemerintah salah satunya bersumber dari penerimaan daerah

sebagaimana yang tertuang dalam APBD. Porsi dana perimbangan terhadap penerimaan daerah sangat besar, yang menunjukkan besarnya ketergantungan fiskal pemerintah daerah di era otonomi. Setidaknya ada lima penyebab tingginya ketergantungan fiskal di Indonesia (Kuncoro dalam Wiyono, 2001), yaitu (1) kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan, (2) tingginya derajat sentralisasi di bidang perpajakan, (3) kendati pajak daerah cukup beragam ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan, (4) adanya kekhawatiran apabila daerah memiliki sumber keuangan yang tinggi maka ada kecenderungan terjadi disintegrasi dan sparatisme, dan (5) kelemahan dalam pemberian subsidi. Sumber pembiayaan pemerintah daerah terdiri atas tiga komponen besar, yaitu sebagai berikut. 1. Pendapatan asli daerah; P2. Pendapatan yang berasal dari pusat; 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dampak Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Investasi merupakan suatu faktor krusial bagi kelangsungan proses pembangunan ekonomi (*suistanable development*), atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pembangunan ekonomi melibatkan kegiatan-kegiatan produksi (barang dan jasa) di semua sektor-sektor ekonomi. Dengan adanya kegiatan

produksi, maka terciptalah kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat meningkat, yang selanjutnya menciptakan/meningkatkan permintaan di pasar. Pasar berkembang dan berarti juga volume kegiatan produksi, kesempatan kerja dan pendapatan di dalam negeri meningkat, dan seterusnya, maka terciptalah pertumbuhan ekonomi (Tambunan, 2001:63)

Keterkaitan antara tabungan, modal, dan pertumbuhan ekonomi telah ditunjukkan dengan baik sekali oleh pengalaman-pengalaman masyarakat industri. Banyak studi yang membuktikan bahwa rendahnya tingkat investasi di AS pada tahun 1970-an (sebesar 18 persen dari GNP, terendah di antara semua negara industri maju) sebagai penyebab pokok dari rendahnya pertumbuhan produktivitas-dari rendahnya tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita negara tersebut sejak 1970, dibandingkan dengan Jepang dan Eropa Barat (Arsyad, 1999). Tingkat pertumbuhan ekonomi yang mantap dan kuat dalam jangka panjang hanya bisa terjadi jika masyarakat mampu mempertahankan proporsi investasi yang cukup besar dari GDP-nya (Arsyad, 1999:98).

Pengaruh investasi asing langsung terhadap pertumbuhan ekonomi merupakan arti penting bagi negara sedang berkembang termasuk Indonesia. Sampai

saat ini konsep pembangunan dengan menggunakan modal asing masih sering menimbulkan pendapat. *Foreign Direct Investment* (FDI) dipandang sebagai cara yang lebih efektif untuk mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara.

Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus-menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Pengaruh dari peran ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi dalam perekonomian. Pertama, investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat. Maka kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat dan pendapatan nasional.

Peningkatan seperti ini akan selalu diikuti oleh penambahan dalam kesempatan kerja. Kedua, penambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambahkan kepastian memproduksi dimasa depan dan perkembangan ini akan menstimulir pertumbuhan produksi nasional dan kesempatan kerja. Ketiga, investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi. Perkembangan akan memberikan sumbangan penting ke atas kenaikan produktivitas dan pendapatan perkapita masyarakat (Sukirno,2002:367).

Konsep Tenaga Kerja dan Kaitannya dengan Penduduk

Menurut Payaman (1998:43), sumber daya manusia atau *human resources* mengandung dua pengertian. Pertama, sumber daya manusia (SDM) mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal ini SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa.

Pengertian kedua menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara fisik, kemampuan bekerja diukur dengan usia. Dengan kata lain, orang dalam usia kerja dianggap mampu bekerja. Kelompok penduduk usia kerja tersebut dinamakan Tenaga Kerja atau *manpower*.

Perkembangan tenaga kerja sangat erat kaitannya dengan jumlah penduduk. Dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi, pertumbuhan penduduk dapat diartikan bertambahnya salah satu faktor produksi yaitu tenaga kerja, yang diharapkan mampu meningkatkan *total output*. Menurut Arsyad (1999:267), pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi di negara sedang berkembang akan

menimbulkan berbagai masalah dan hambatan bagi upaya-upaya pembangunan yang dilakukan karena pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menyebabkan cepatnya pertumbuhan jumlah tenaga kerja, sedangkan kemampuan negara sedang berkembang dalam menciptakan kesempatan kerja baru sangat terbatas. Kemudian perkembangan penduduk yang semakin cepat dan dalam jumlah yang sangat besar, menimbulkan beberapa masalah yang cukup serius di negara sedang berkembang. Masalah-masalah tersebut adalah (Sukirno, 1985:186): (i) masalah struktur penduduk yang berat sebelah kepada penduduk yang berusia di bawah umur (di bawah 10 tahun); (ii) masalah pengangguran yang dihadapi bertambah serius; (iii) proses urbanisasi atau perpindahan penduduk dari daerah perdesaan ke daerah perkotaan menjadi bertambah deras.

Ada 4 aspek mengenai masalah penduduk yang perlu ditelaah khususnya

Hipotesis penelitian

Berdasarkan acuan yang dipaparkan secara rinci tersebut baik penelitian terdahulu (empiris) maupun tinjauan pustaka yang dimasukkan, maka hipotesis penelitian yang akan diajukan adalah sebagai berikut:

1. Secara serempak (bersama-sama) variabel dana perimbangan, investasi swasta, dan tenaga kerja berpengaruh

di negara-negara sedang berkembang yaitu: (1) Adanya tingkat perkembangan penduduk yang relatif tinggi; (2) Adanya struktur umur yang tidak favorabel; (3) Tidak adanya distribusi penduduk yang seimbang; (4) Tidak adanya tenaga kerja yang terdidik dan terlatih (Irawan dan Suparmoko, 2002:61).

Penduduk dalam suatu daerah berperan sebagai konsumen (permintaan) dan produsen (produsen), selain itu sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Sebagai konsumen berpengaruh terhadap sisi permintaan (*demand side*), yang dengan sendirinya diikuti oleh sisi penawaran (*supply side*). Oleh karena itu, perkembangan penduduk tidak selalu merupakan akar masalah yang menghambat pembangunan ekonomi. Ini dengan asumsi bahwa penduduk ini memiliki tingkat penghasilan yang mumpuni sehingga memiliki kapasitas yang tinggi untuk menghasilkan dan menyerap hasil produksi yang dihasilkan.

positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah kota Provinsi Kalimantan Timur selama periode 2004 – 2008.

2. Secara parsial variabel dana perimbangan, investasi swasta, dan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah kota Provinsi

Kalimantan Timur selama periode 2004 – 2008.

1. Variabel dana perimbangan berpengaruh dominan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah kota Provinsi Kalimantan Timur selama periode 2004 – 2008.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan merupakan data publikasi resmi dari instansi pemerintah seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltim, Badan Promosi dan Investasi Daerah (BPID) Kaltim, dan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Tk. I Provinsi Kaltim.

Alat Analisis dan Pengujian Hipotesis

1. Regresi Linear Berganda

Regresi Linear Berganda digunakan untuk melakukan pengujian hubungan antara sebuah variabel dependen dengan beberapa variabel independen. Jika variabel independennya lebih dari satu, maka disebut persamaan regresi linear berganda.

Adapun formula Regresi Berganda adalah:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

(Algifari, 2000)

Di mana :

- Y = Variabel terikat
- a = Konstanta
- b = Koefisien Regresi
- X₁ = variabel bebas

X₂ = variabel bebas

e = Faktor pengganggu

Rumus regresi berganda tersebut, kemudian disesuaikan dengan penerapan penelitian dengan formulasi sebagai berikut :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Di mana :

Y = Laju Pertumbuhan PDRB ADHK

a = Konstanta

b₁, b₂, b₃ = Koefisien Regresi

X₁ = Dana Perimbangan

X₂ = Investasi Swasta (PMA dan PMDN)

X₃ = Tenaga Kerja

e = Faktor pengganggu/*error term*

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis dalam penelitian ini akan menguji pengaruh dari variabel dana perimbangan (X1), investasi swasta (X2), dan angkatan kerja (X3) terhadap PDRB (Y). Data yang digunakan adalah data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. Periode pengamatan data adalah dari tahun 2004 hingga 2008, dengan wilayah pengamatan yaitu di wilayah kota meliputi Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang, dan Kota Tarakan.

Pendekatan penelitian menggunakan data gabungan *time series* dan *cross section*. Analisis data dengan menggunakan model ekonometrika

dengan regresi linear berganda. Model regresi berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Di mana :

Y = Laju pertumbuhan ekonomi (PDRB ADHK)

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

X₁ = Dana Perimbangan

X₂ = Investasi Swasta (PMA dan PMDN) Kumulatif

X₃ = Tenaga Kerja

e = Faktor pengganggu/error term

Nilai *Standard Error of The Estimate* (SEE) sebesar 2,822 yang artinya

Kelayakan model bisa dilihat dengan menguji hipotesis kebermaknaan pengaruh dana perimbangan (X₁), investasi swasta (X₂), dan tenaga kerja (X₃) secara bersama-sama dengan memperhitungkan tingkat signifikansinya.

Perhitungan dengan menggunakan uji F (lihat lampiran) pada tingkat kepercayaan 95% dan $\alpha = 0,05$ diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 10,087 dengan probability sig 0,001. Ketentuan mengatakan jika angka probabilitas < 0,05 atau F_{hitung} > F_{tabel} maka ada hubungan yang signifikan variabel bebas terhadap variabel terikat.

Signifikansi hubungan secara bersama-sama dana perimbangan (X₁), investasi swasta (X₂), dan tenaga kerja

makin kecil SEE akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel.

Hasil dari nilai koefisien regresi masing-masing variabel bebas yaitu variabel dana perimbangan, investasi swasta dan tenaga kerja, setelah dilakukan pengolahan data dengan bantuan program SPSS diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,072 - 0,022 X_1 + 0,002 X_2 + 0,055 X_3$$

(X₃) terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah kota Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat dari angka probabilitas (sig) yang menunjukkan nilai yang lebih kecil daripada 0,05 (lihat lampiran). Ketentuan mengatakan jika angka Sig. < 0,05 maka ada hubungan yang signifikan. Dengan demikian hipotesis pertama yang mengatakan bahwa dana perimbangan, investasi swasta, dan tenaga kerja, berpengaruh secara bersama terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah kota Provinsi Kalimantan Timur dapat diterima dan terbukti kebenarannya karena angka Sig. < 0,05 yaitu 0,001.

Sedangkan secara parsial atau individual untuk mengetahui seberapa signifikan pengaruh parsial dari setiap

variabel yaitu variabel dana perimbangan (X_1), investasi swasta (X_2), dan tenaga kerja (X_3) terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah kota Provinsi Kalimantan Timur, digunakan uji t. Kriteria uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas signifikansi (Sig.) tiap variabel bebas dengan level signifikansinya. Jika ternyata nilainya mempunyai nilai Sig. < level signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) berarti variabel-variabel bebas tersebut secara parsial pada taraf signifikansi 5%. Signifikansi hubungan antara variabel dependen dan variabel independen dapat dilihat berdasarkan hasil SPSS (lihat lampiran), di mana seluruh variabel bebas yaitu dana perimbangan, investasi swasta, dan tenaga kerja signifikan karena mempunyai nilai probabilitas signifikansi (Sig.) < batas toleransi tingkat signifikansi sebesar 5% (sering disebut dengan tingkat alpha 0,05). Variabel dana perimbangan memiliki signifikansi $0,001 < 0,05$. Variabel investasi swasta memiliki signifikansi $0,004 < 0,05$. Dan variabel tenaga kerja memiliki signifikansi yang nyata sempurna sebesar $0,000 < 0,05$. Berarti variabel-variabel bebas tersebut secara parsial pada taraf signifikansi 5% mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah kota Provinsi Kalimantan Timur.

Untuk mengetahui faktor mana yang dominan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah kota Provinsi Kalimantan Timur, digunakan koefisien regresi yang distandarisasi (*standardized coefficients*). Hipotesis sebelumnya yang diajukan adalah dana perimbangan berpengaruh dominan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah kota Provinsi Kalimantan Timur selama periode 2004 – 2008.

Berdasarkan hasil output SPSS (lihat lampiran) dapat diketahui nilai *standardized coefficients* dana perimbangan adalah $0,786 >$ dari *standardized coefficients* investasi swasta ($0,554$) dan tenaga kerja ($0,766$). Hal ini berarti hipotesis kedua dengan pernyataan bahwa dana perimbangan berpengaruh dominan terhadap pertumbuhan ekonomi terbukti.

Pembahasan

Hasil penelitian ini justru tidak menunjukkan arah yang positif dari efek dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah kota Provinsi Kalimantan Timur selama periode pengamatan tahun 2004 hingga 2008. Dana perimbangan ternyata belum memberikan hasil yang optimal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dari hasil penelitian ini, jika variabel dana perimbangan (X_1) meningkat satu satuan,

maka pertumbuhan ekonomi wilayah kota di Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan mengalami penurunan sebesar 0,022 persen. Pengaruh ini signifikan pada tingkat kepercayaan 95% dan $\alpha = 0,05$.

Kondisi menurunnya pertumbuhan ekonomi akibat efek dari dana perimbangan menjadi catatan tersendiri di wilayah kota Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini diakibatkan dana perimbangan yang menjadi sumber dominan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) lebih banyak “terkurus” untuk belanja pegawai dan belanja operasional pemerintah yang cenderung tidak efisien, tidak produktif, dan relatif kecil dampak *multiplier effect*-nya ke sektor riil. Hampir sekitar 67-70 persen belanja pemerintah merupakan belanja pegawai/personalia (Wilopo & Budiono, 2007). Sementara belanja pembangunan yang bermanfaat ke sektor riil, justru kurang begitu digalakkan. Menurut Lewis (2000) dalam Pusporini (2006) dana perimbangan yang menjadi sumber utama pendapatan daerah pada umumnya sebagian besar digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin, sehingga anggaran untuk pembangunan menjadi kecil.

Sepanjang tahun 2004-2008, dana perimbangan di Provinsi Kalimantan Timur selalu mengalami peningkatan.

Selain itu porsi dana perimbangan terhadap total dari APBD Provinsi Kalimantan Timur selalu dominan. Ini mengindikasikan besarnya ketergantungan APBD terhadap dana perimbangan dibandingkan penerimaan lain seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penerimaan lain yang sah.

Setidaknya ada lima penyebab tingginya ketergantungan fiskal di Indonesia (Kuncoro dalam Wiyono, 2001), yaitu (1) kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan, (2) tingginya derajat sentralisasi di bidang perpajakan, (3) kendati pajak daerah cukup beragam ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan, (4) adanya kekhawatiran apabila daerah memiliki sumber keuangan yang tinggi maka ada kecenderungan terjadi disintegrasi dan sparatisme, dan (5) kelemahan dalam pemberian subsidi. Sumber pembiayaan pemerintah daerah terdiri atas tiga komponen besar, sebagai berikut. 1. Pendapatan asli daerah; 2. Pendapatan yang berasal dari pusat; 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Di antara ketiga komponen sumber pendapatan tersebut, komponen kedua, yaitu pendapatan yang berasal dari pusat merupakan cermin atau indikator dari ketergantungan pendanaan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Adapun pengaruh investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah kota Provinsi Kalimantan Timur berpengaruh positif meskipun memang relatif kecil pengaruhnya. Jika variabel investasi swasta (X_2) meningkat, maka diperkirakan pertumbuhan ekonomi wilayah kota di Provinsi Kalimantan Timur juga meningkat sebesar 0,002 persen. Pengaruh ini signifikan pada tingkat kepercayaan 95% dan $\alpha = 0,05$. Temuan ini relevan dengan teori pertumbuhan ekonomi dari Harrod-Domar, yang menerangkan adanya korelasi positif antara tingkat investasi dan laju pertumbuhan ekonomi. Temuan penelitian ini juga tidak berbeda jauh dengan hasil empiris dari Rivai (2007) dan Sucahyo (2004), yang menemukan adanya kontribusi positif dari variabel investasi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil studi ini sesuai dengan studi sebelumnya bahwa pelaksanaan otonomi daerah sejak 2001 telah memperburuk iklim investasi di Indonesia. Masih rendahnya pelayanan publik, kurangnya kepastian hukum dan berbagai peraturan daerah (Perda) yang tidak “pro-bisnis” diidentifikasi sebagai bukti iklim bisnis yang tidak kondusif. Pelayanan publik yang dikeluhkan terutama terkait dengan ketidakpastian biaya dan lamanya waktu berurusan dengan perijinan dan birokrasi.

Ini diperparah dengan masih berlanjutnya berbagai pungutan baik resmi maupun liar. Alasan utama mengapa investor masih khawatir untuk melakukan bisnis di Indonesia adalah ketidakstabilan ekonomi makro, ketidakpastian kebijakan, korupsi (oleh pemda maupun pemerintah pusat) perijinan usaha, dan regulasi pasar tenaga kerja. Studi Kuncoro, et.al (2004) menunjukkan masih adanya “*grease money*” dalam bentuk pungli, upeti dan biaya ekstra yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dari sejak mencari bahan baku, memproses input menjadi output, maupun ekspor. Studi dari LPEM FEUI (2000) terhadap lebih dari 60 kabupaten/kota, telah menemukan bahwa ketidakpastian usaha telah meningkat secara signifikan selama periode transisi otonomi daerah. Hal inilah yang relatif menyebabkan kurang maksimalnya peran investasi dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di daerah.

Memang diakui bahwa investasi swasta yang ditanamkan di wilayah kota sangat besar. Hal ini karena memang para penanam modal swasta (investor) cenderung lebih menyukai melakukan ekspansi ekonomi pada daerah perkotaan atau daerah yang telah memiliki fasilitas penunjang kegiatan ekonomi mereka, seperti sarana perhubungan, infrastruktur listrik, dan ketersediaan tenaga kerja. Kuncoro (2004:2), mengatakan bahwa

investor lebih suka memilih kawasan perkotaan yang menawarkan penghematan biaya akibat kemudahan aksesibilitas dan keberadaan infrastruktur kota. Fenomena ini disebut oleh Kuncoro sebagai *localization economies*.

Faktor produksi alam dan potensi ekonomi di wilayah kota sangat besar untuk digali dan dikelola dengan produktif. Keterlibatan tenaga kerja sangat penting peranannya sebagai faktor produksi yang akan menghasilkan barang dan jasa, sehingga meningkatkan PDRB dan mempercepat laju gerak perekonomian. Tenaga kerja di wilayah perkotaan memang jauh lebih produktif karena berbekal tingkat pendidikan dan keterampilan yang lebih baik, sehingga dapat berkontribusi lebih besar terhadap pembentukan perekonomian secara agregat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka kesimpulan yang dapat diberikan adalah besarnya angka Koefisien Determinasi dalam hasil perhitungan di atas ialah sebesar 0,654 atau sama dengan 65,4%. Sedangkan *Adjusted R square* sebesar 0,589 berarti 58,9 persen variasi dari pertumbuhan ekonomi di wilayah kota Provinsi Kalimantan Timur dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel dana

perimbangan, investasi swasta, dan angkatan kerja.

Setelah dilakukan pengolahan data dengan bantuan program SPSS diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,072 - 0,022 X_1 + 0,002 X_2 + 0,055 X_3$$

Secara simultan (bersama-sama) variabel dana keseimbangan, investasi swasta, dan tenaga kerja, berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayahkota Provinsi Kalimantan Timur dengan angka probabilitas < 0,05 yaitu 0,001.

Variabel dana keseimbangan memiliki signifikansi $0,001 < 0,05$. Variabel investasi swasta memiliki signifikansi $0,004 < 0,05$. Dan variabel tenaga kerja memiliki signifikansi yang nyata sempurna sebesar $0,000 < 0,05$. Berarti variabel-variabel bebas tersebut secara parsial pada taraf signifikansi 5% mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah kota Provinsi Kalimantan Timur. Dana keseimbangan berpengaruh dominan terhadap pertumbuhan ekonomi terbukti, karena nilai *standardized coefficients* dana keseimbangan adalah $0,786 >$ dari *standardized coefficients* investasi swasta (0,555) dan angkatan kerja (0,765).

SARAN

Hasil dari penelitian ini memberikan beberapa sebagai berikut

Pemerintah wilayah kota (Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang, dan Kota Tarakan) perlu terus melakukan kajian yang intensif terhadap implikasi dana perimbangan, karena terbukti bahwa dana tersebut belum memberikan hasil yang optimal dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi.

Dana perimbangan yang merupakan transfer dari pusat kepada wilayah kota di Provinsi Kalimantan Timur, harus dapat lebih dioptimalkan penggunaannya untuk kepentingan belanja daerah yang produktif dan efisien sehingga memberikan dampak positif untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah daerah di wilayah kota harus membuat *investment policy* sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut serta ditunjang oleh kecakapan SDM daerah tersebut. Sehingga dapat menstimulir, *pertama*, terciptanya sinergisitas antara input (faktor produksi) dan output (hasil produksi) perekonomian daerah. *Kedua*, adanya kesinambungan perekonomian (*economic sustainability movement*) sesuai dengan maket dan visi daerah.

Pemerintah daerah di wilayah kota diharapkan terus memacu program-program yang terkait dengan peningkatan kualitas tenaga kerja, seperti pelatihan *skill competencies* melalui BLK (Balai Latihan

Kerja), serta kursus pendidikan singkat yang terkait dengan kebutuhan pasar kerja. Hal ini akan mempercepat produktivitas tenaga kerja dalam memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. 1997. *Ekonomi Pembangunan*, Bagian Penerbitan. STIE- YKPN: Yogyakarta
- .
Badikenita. 2004. *Analisis Kausalitas Antara Ekspor Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Negara-Negara ASEAN*. FE USU : Sumatra Utara
- Boediono. 1985. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. BPFE: Yogyakarta.
- Ehtisham, Ahmad; Ma, Jun; Searle, Bob; Piperno, Stefano, 2002. "Intergovernmental Grant System: Application of a General Framework to Indonesia." IMF Working Paper No. WP/02/128, International Monetary Fund, Washington DC.
- Gujarati, Damodar N. 2003. *Basic Econometrics*. Mc Graw Hill: USA.
- Jhingan M.L. 2000. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Penerjemah : D. Guritno, Edisi Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mahi, Raksaka. 2002. "Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Fiskal". Media Indonesia edisi Kamis, 03 Januari.
- Mahi, Raksaka. 2005. "Peran Pendapatan Asli Daerah di Era Otonomi Daerah". *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol. 6, No. 1 Juli.
- Makmun. 2000. "Desentralisasi dan Hubungan Keuangan Pusat dan

- Daerah*". Kajian Ekonomi dan Keuangan Tahun IV Juni No.2, Badan Analisa Keuangan dan Moneter, Departemen Keuangan RI.
- Samuelson, Paul A dan William D. Nordhaus. 1992. *Ekonomi Jilid I*. Edisi 12, Jakarta: Erlangga.
- Sasana, Hadi. 2005. *Analisis Dampak Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Antar Wilayah, antar Sektor di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi Vol. 12 No. 2 September.
- Sidik, Machfud, Raksaka Mahi, Robert Simanjuntak dan Bambang Brodjonegoro. 2002. *Dana Alokasi Umum : Konsep, Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah*. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.
- Sidik, Machfud. 2002. "Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan desentralisasi Fiskal : Antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia". Disampaikan dalam Seminar : Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia, Yogyakarta.
- Sodik, Jamzani dan Nuryadin, Didi. 2005. *Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Regional (Studi Kasus Pada 26 Propinsi di Indonesia, Pra dan Pasca Otonomi)*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 10 No. 2, Agustus, UII Yogyakarta.
- Sukirno, Sadono. 1998. *Pengantar Teori Makroekonomi*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- _____. 2002. *Pengantar Teori Makroekonomi*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Sulaiman, Wahid. 2002. *Jalan Pintas Menguasai SPSS 10.00*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Tambunan, Tulus T.H. 2003. *Globalisasi dan Perdagangan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tambunan, Tulus T.H. 2006. *Perekonomian Indonesia Sejak Orde Lama hingga Pasca Krisis*, Jakarta: PT. Quantum Pustaka.
- Todaro, Michael, P. dan Stephen C. Smith. 2003. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Edisi Kedelapan, Penerbit Erlangga: Jakarta.
- Todaro, Michael, P. 1997. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jilid 1, Edisi Keenam, UPP AMP YKPN: Yogyakarta.
- Utomo, Yuni Priadi. 2000. *Ekspor Mendorong Pertumbuhan atau Pertumbuhan Mendorong Ekspor*. Jurnal Manajemen, Vol.1 No.1: UII, Yogyakarta.
- Pujiati, Amin. 2008. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Karasidenan Semarang Era Desentralisasi Fiskal*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Tahun VII Januari No.4, UII Yogyakarta.
- Purbadharmadja, Ida Bagus. 2006. *Implikasi Variabel Pengeluaran dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. Buletin Studi Ekonomi Volume 11 Nomor 1, Universitas Udaya Bali.
- Pusporini, Dewi. 2006. *Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Era Desentralisasi Fiskal 2001 – 2003*. Tesis Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Waluyo, Joko. 2007. *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Antardaerah Di Indonesia*, Parallel Session IA: Fiscal Decentralization 12 Desember 2007, Wisma Makara, Kampus UI – Depok.

Widarjono, Agus. 2005. *Ekonometrika Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Ekonisia FE UII: Yogyakarta.

Wijaya, Faried. 1990. *Ekonomika Makro*. BPFE: Yogyakarta